

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



KENDALA DAN FAKTOR UTAMA
KEBERHASILAN PELAKSANA
SISTEM RESI GUDANG (SRG)

ANTARA KONSOLIDASI
DAN CITRA

INI BUKAN SOAL
BANGUN GUDANG
TAPI BANGUN
PERUBAHAN

EDISI **188**

BAPPEBTI/MJL/188/XVI/2017/EDISI JULI

Prosedur Penyelesaian Sengketa



Pendaftaran

Pemohon mendaftarkan permohonan Arbitrase kepada BAKTI.



Konfirmasi

Tuntutan akan diteruskan oleh BAKTI kepada pihak yang dituntut (Termohon), dan meminta jawaban terhadap tuntutan permohonan paling lambat 14 hari.



Penunjukan Arbiter

Pemohon & Termohon masing-masing mengusulkan satu Arbiter, kemudian kedua Arbiter terpilih bersama-sama menunjuk Arbiter ketiga sebagai ketua Majelis Arbitrase. Atau Para Pihak dapat menyepakati satu Arbiter tunggal.



Penyelenggaraan Sidang

Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal menyelenggarakan sidang pertama, Tuntutan akan dinyatakan gugur jika Pemohon tidak menghadiri sidang pertama, sedangkan jika Termohon tidak menghadiri dua kali persidangan, maka pemeriksaan dapat diajukan dan diputuskan tanpa kehadiran pemohon.

BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



5

Sidang Pertama

Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara Para Pihak. Apabila upaya perdamaian berhasil, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan membuatkan akta perdamaian. Namun jika gagal, maka Arbitrase dilanjutkan.



6

Sidang Lanjutan

Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut peraturan & acara Arbitrase BAKTI. Proses pemeriksaan lanjutan ini memakan waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal terpilih. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang jika dipandang perlu oleh Majelis dan disepakati oleh Para Pihak.



7

Hasil Putusan

Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai (Ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari Para Pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal membacakan Putusan untuk segera dilaksanakan oleh Para Pihak. Selanjutnya BAKTI akan mendaftarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri dimana termohon berdomisili.

Arbiter yang dipilih
adalah orang
perseorangan yang
tercatat dalam Daftar
Arbiter BAKTI

BERITA UTAMA

Awas, Investasi Bodong. Waspadalah!

4

DARI LAPANGAN

Ini Bukan Soal Bangun Gudang,
Tapi Membangun Perubahan

20



KOLOM

Kendala dan Faktor Utama
Keberhasilan Pelaksanaan
Sistem Resi Gudang (SRG)

22



KIPRAH

Antara Konsolidasi dan Citra

24



DAFTAR ISI

RESI GUDANG

Peran Sistem Resi Gudang
Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

10

PASAR LELANG

Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi
Segera Dilaksanakan

12

AGENDA FOTO

14

AKTUALITA

- Diseminasi Peraturan di Bidang PBK terkait Program APU/PPT
- Demi Produsen Kopi Kedua Dunia, Indonesia berguru ke Vietnam
- Mendag Kunjungi PZ Wilmar di Nigeria
- Kaltim Sertifikasi 1,3 Juta Bibit Tanaman Perkebunan

16

ENGLISH CORNER

18

INFO HARGA

21

KOMIKITA

26



Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Subagiyo
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Gita Regina
Leli Wulandari

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail :
humas.bappebti@kemendag.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti

www.bappebti.go.id

AWAS, INVESTASI BODONG. WASPADALAH!

Penipuan dengan kedok investasi sejauh ini telah merambah ke berbagai jenis usaha, tak terkecuali usaha perdagangan berjangka komoditi [PBK].

Pada pertengahan Juli 2017 Otoritas Jasa Keuangan [OJK] merilis kabar terbaru: Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 11 entitas usaha yang bergerak dalam pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan dana investasi. Kegiatan kesebelas entitas tersebut dihentikan karena mereka tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan melakukan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi adalah satuan tugas yang dibentuk OJK untuk mencegah dan memberantas usaha pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal. Di bawah koordinasi OJK, dalam aksinya Satgas Waspada Investasi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM], Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan dua lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Kepolisian RI. Belakangan juga disertakan dalam Satgas yaitu Bank Indonesia dan PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan].

Pembentukan Satgas Waspada Investasi dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan usaha pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal atau investasi bodong yang merugikan masyarakat. Maraknya penyelenggaraan investasi bodong di Indonesia terjadi seiring dengan meningkatnya ekonomi



Sejak dibentuk Satgas Waspada Investasi pada tanggal 1 Januari 2016 ada puluhan entitas usaha investasi bodong yang di adukan masyarakat.

masyarakat. Jumlah warga 2017 ada berpenghasilan menengah ke atas semakin bertambah. Mereka bisa hidup berkecukupan dan mampu menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung. Sebagian lagi ingin berinvestasi melalui berbagai sarana yang ada. Sayangnya, hanya sedikit yang memahami bagaimana berinvestasi secara benar, aman dan menguntungkan. Kelompok masyarakat inilah yang menjadi sasaran dan korban dari penyelenggara investasi bodong. Kelompok masyarakat ini biasanya tertarik iming-iming yang ditawarkan yaitu keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Tetapi, sebenarnya, semua tawaran menggiurkan itu tidak mungkin diwujudkan karena memang tidak masuk akal. Ujung-ujungnya, para investor hanya mendapati kerugian. Banyaknya pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Satgas Waspada Investasi membuktikan hal itu.

Sejak dibentuk Satgas Waspada Investasi pada tanggal 1 Januari 2016 ada puluhan entitas usaha investasi bodong yang diadukan masyarakat. Sebagian dari jumlah itu sudah dihentikan kegiatannya. Dalam tahun

2017 ada 43 entitas usaha yang ditutup karena tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat. Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat penipuan dengan kedok investasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai trilyunan rupiah.

Perdagangan Berjangka Komoditi

Penipuan dengan kedok investasi sejauh ini telah merambah ke berbagai jenis usaha, tak terkecuali usaha perdagangan berjangka komoditi [PBK]. Kepala Bappebti Bachrul Chairi di Jakarta, Rabu [19/7/2017], mengungkapkan, selama dua tahun terakhir ada kecenderungan meningkatnya pertumbuhan industri PBK. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Pada tahun 2015 transaksi PBK naik 7,1 persen. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2016, mencapai 6,4 persen. Namun pada semester pertama 2017 terjadi penurunan sekitar 5,67 persen dibanding semester pertama tahun sebelumnya. Menurut Bachrul, hal itu terkait kelesuan ekonomi secara umum.

"Itu konteks ekonominya,"



ungkapnya. Tetapi, Bachrul menunjuk adanya konteks lain yaitu maraknya pialang ilegal [illegal broker] yang beroperasi

di Indonesia. Transaksi PBK tahun 2016 misalnya, mencapai 7 juta lot. Namun, jumlah itu diperkirakan hanya 40 persen dari kontrak yang sebenarnya. "Jadi, ada 60 persen yang tidak tercatat. Ini karena peranan *illegal broker* yaitu perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia melalui *introducing broker* [IB]. Mereka itu tidak memiliki izin dari Bappebti," jelas Bachrul. Perusahaan mereka ada di China, Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara lain, tetapi tidak memiliki kantor di Indonesia. Di sini mereka hanya numpang alamat.

Dijelaskan Bachrul, selain IB yang tidak memiliki kantor di Indonesia ada juga *illegal broker* dengan perusahaan di Indonesia, tetapi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang yaitu Bappebti. Ada juga yang menggunakan modus menyaru perusahaan - perusahaan asing dengan membuat website dengan nama mirip perusahaan di luar negeri. "Dengan nama yang mirip itu, mereka beroperasi seakan-akan sebagai

*“Dengan nama yang mirip itu, mereka beroperasi seakan-akan sebagai perusahaan legal.”
Ujar Bachrul*



perusahaan legal,” ujar Bachrul.

Bappebti selama ini cukup aktif menelisik aktivitas para penyelenggara investasi bodong, khususnya menyangkut perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bappebti memblokir situs-situs *online* yang ditengarai melakukan usaha terkait investasi PBK ilegal. Sejak tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2017 ada 148 website. Dikatakan Bachrul, upaya membatasi gerak para penyelenggara investasi bodong melalui website perlu terus menerus dilakukan. Hal ini mengingat, membuat website sangat mudah.

“Kita akan tingkatkan monitoringnya. Sekarang masih bulanan, nanti kita tingkatkan menjadi dua mingguan dan kalau perlu setiap minggu. Aspebtindo [Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia] setiap minggu ke-3 memberikan laporan hasil pemantauan

mereka terhadap anggota-anggotanya atau temuan mereka tentang web ilegal,” jelas Bachrul. Bukan hanya memblokir situs *online* mereka, Bappebti bersama aparat penegak hukum juga menghentikan kegiatan yang mereka selenggarakan untuk menarik dana dari [calon] nasabah. Menurut Bachrul, untuk merekrut nasabah para pialang ilegal itu biasanya menyelenggarakan kegiatan dengan label seminar, kursus atau pelatihan forex. “Mereka mengadakan seminar. Namun, tujuan utamanya sebenarnya menarik dana dari masyarakat,” ungkap Bachrul.

Dari tahun 2015 hingga Juli 2017 ada 40 kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi yang dihentikan Bappebti bersama aparat penegak hukum. Sebagian dari penyelenggara kegiatan diproses secara hukum. “Misalnya, ada seminar kemudian kita periksa ternyata ilegal, kita bubarkan dan kita tutup. Kalau ada

kerugian kita juga periksa lebih lanjut bekerjasama dengan polisi. Bappebti sendiri memiliki PPNS [Penyidik Pegawai Negeri Sipil],” tegas Bachrul.

Menyangkut perdagangan berjangka komoditi, aksi pialang ilegal juga menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka menawarkan kontrak mikro yang nilainya relatif kecil. “Kontrak mikro ini jumlahnya banyak dalam perdagangan berjangka komoditi,” ungkap Bachrul. Kepala Bappebti ini mencontohkan, untuk produk CPO [*crude palm oil*] atau minyak sawit mentah, ada kontrak mikro 10-20 ton, sedangkan kopi ada kontrak mikro 5 ton. Kontrak-kontrak ini bisa dijual dengan nilai kecil antara 100 ribu hingga satu juta rupiah.

“Nah, karena relatif kecil, kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang mungkin tidak mengerti tetapi tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Akibatnya, banyak ibu rumah



tangga yang uangnya terbatas ikut-ikutan bisnis ini,” tutur Bachrul. Padahal bisnis perdagangan berjangka semestinya diikuti oleh orang yang punya cukup uang. Kalau uangnya terbatas, begitu rugi langsung habis.

Bachrul menegaskan, bisnis berjangka komoditi bersifat *high risk high return*. Oleh sebab itu, para nasabahnya harus benar - benar mendapat perlindungan. Bagi perusahaan berjangka, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk menjadi direksi atau komisaris perusahaan perdagangan berjangka, misalnya, harus diuji, harus diakreditasi. “Wakil pialang saja harus lulus ujian terlebih dahulu. Belum lagi soal modal yang disetor, laporan harian, laporan bulanan dan sebagainya. Kalau tidak memenuhi persyaratan kita tegur, lalu kita tutup,” kata Bachrul.

Edukasi Pada Masyarakat

Kepala Bappebti Bachrul Chairi menyatakan, ketentuan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi sudah baik. Selain mengatur persyaratan ketat bagi perusahaan berjangka, UU No 10 Tahun 2011 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi juga mencantumkan sanksi berat bagi pelanggaran di bidang usaha ini berupa hukuman penjara 5-10 tahun dan atau denda antara 10 hingga 20 milyar rupiah. Berkaitan dengan upaya menanggulangi investasi bodong, Bachrul menunjuk pembentukan Satgas Waspada Investasi sangat baik. Adanya Satgas tersebut memudahkan koordinasi antar lembaga, sehingga upaya-upaya penindakan terhadap pelanggaran - pelanggaran yang terjadi lebih mudah dilakukan.

Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi mewakili unsur Kementerian Perdagangan juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah-daerah. Awal Juli 2017 misalnya, Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan aparat penegak hukum Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi [Rakor] Penanganan Kasus Hukum di Bidang PBK di Surakarta, Jawa Tengah. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati, menyatakan, rakor ini bertujuan menyamakan persepsi

di antara semua aparat penegak hukum, serta menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan berjangka, baik yang dilakukan oleh mereka yang yang tidak memiliki izin, maupun yang memiliki izin dari Bappebti.

Sri mengharapkan masyarakat berhati-hati dalam mengikuti kegiatan yang berkedok pelatihan, seminar, atau *workshop* forex secara gratis yang ujung-ujungnya menawarkan peserta menjadi nasabah dan selanjutnya melakukan transaksi forex dengan iming-iming pasti untung dan penghasilan tetap [*fixed income*].

“Investasi di bidang PBK memiliki tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih jeli dan teliti apabila mau berinvestasi dan memilih perusahaan pialang yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Bappebti,” tegas Sri. Saat ini terdapat 65 perusahaan pialang berjangka, 2 bursa berjangka, 2 kliring berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, dan 1 asosiasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Sri mengingatkan masyarakat yang ingin berinvestasi di bidang PBK untuk mengecek legalitas perusahaannya di Bappebti. “Hal itu bisa dilakukan dengan mengakses website Bappebti [www.bappebti.go.id],” ujar Sri Hariyati.

Memang, untuk memberantas penipuan berkedok investasi tidak cukup dengan penegakan hukum. Menurut Kepala Bappebti Bachrul Chairi, tak kalah pentingnya yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah tertipu dan menjadi korban investasi bodong. Bappebti, tegas Bachrul, pun berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan.



TIPS BERINVESTASI SECARA AMAN

1. Kenali profil investasi diri

Setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, serta mengharapkan tingkat keuntungan (return) yang berbeda juga.

2. Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan

Berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya.

3. Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya

Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya.

4. Pahami siapa regulatornya

Pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa mendatang.

5. Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk.

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk.

Jika masih ragu atau bingung tentang suatu tawaran investasi, masyarakat dapat menanyakannya ke masing-masing kontak regulator terkait :

Otoritas Jasa Keuangan
Kementerian Perdagangan (Bappebti)
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Komunikasi dan Informasi



CIRI - CIRI PENIPUAN INVESTASI

1. Return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan;
2. Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain;
3. Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor;
4. Dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.

[Sumber: <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/faq>]

Berikut ini beberapa pasal peraturan berkaitan dengan sanksi terhadap investasi bodong berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:



Pasal 71

[1] Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat [1], Pasal 25 ayat [2], Pasal 31 ayat [1], Pasal 34 ayat [1], atau Pasal 39 ayat [1], dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 [lima] tahun dan paling lama 10 [sepuluh] tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 [sepuluh miliar rupiah] dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 [dua puluh miliar rupiah].

[2] Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat [2], Pasal 14 ayat [3], Pasal 30A ayat [1], Pasal 30A ayat [2], Pasal 32, atau Pasal 36 ayat [2] dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 [lima] tahun dan paling lama 10 [sepuluh] tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 [sepuluh miliar rupiah] dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 [dua puluh miliar rupiah].

[3] Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [3], pasal 34 ayat [3], atau Pasal 39 ayat [3] atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat [1] dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 [satu] tahun

dan paling lama 3 [tiga] tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 [lima ratus juta rupiah] dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 [satu miliar lima ratus juta rupiah].

PENJELASAN PASAL 5 Huruf b

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan semua Pihak” adalah terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain, membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat Nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah Nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon Nasabah, dan tidak menempatkan dana Nasabah pada rekening yang terpisah.

PENJELASAN PASAL 6 Huruf n

Yang dimaksud dengan “promosi yang menyesatkan” adalah pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka yang meskipun benar, Perdagangan Berjangka dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahamannya, antara lain: 1) memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta; 2) menjanjikan keuntungan tanpa memberitahukan risiko yang dihadapi; atau 3) mengajak atau menganjurkan untuk membeli dan/atau menjual Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu tanpa analisis

yang kuat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pihak yang melakukan kesalahan, antara lain: 1) menghentikan atau memperbaiki pernyataan yang telah disebarluaskan; 2) membuat pernyataan pengakuan dan permohonan maaf atas kesalahan tersebut; dan/atau 3) membayar ganti rugi yang ditetapkan, baik dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, arbitrase, maupun melalui putusan pengadilan.

PENJELASAN PASAL 6 Huruf s

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat” adalah tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, antara lain: 1) memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu; 2) membekukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu; dan/atau 3) meminta Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran dan apabila perlu, mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*selengkapnya bisa dilihat pada: http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2011_10.pdf



Peran Sistem Resi Gudang dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerintah berkepentingan mengembangkan SRG di daerah. Karena fluktuasi harga komoditas khususnya pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi secara nasional.

Bicara Sistem Resi Gudang berarti ngomong soal aktivitas ekonomi yang terus bertumbuhkembang. Dari sejak mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tahun 2008, kini keberadaannya semakin meluas.

Dalam acara Literasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Lampung Tengah, Kamis (13/7), Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengungkapkan SRG telah diterbitkan di 77 kabupaten/kota yang tersebar di 21 propinsi. Secara kumulatif, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2017 di gudang SRG milik pemerintah maupun swasta sebanyak 2.473 resi dengan total volume 88.867,84 ton senilai Rp504,2 miliar yang terdiri dari 73.759,53 ton gabah, 8.042,10 ton beras, 5.704,77 ton jagung, 721,57 ton kopi, 605,57 ton rumput laut, 3,14 ton kakao, dan 31,16 ton rotan.

“Sebagai instrumen pembiayaan,

kehadiran SRG juga telah memberikan manfaat nyata kepada para pelaku usaha terutama petani, kelompok tani, gapoktan maupun koperasi melalui pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dengan bunga 6 % per tahun atau 0,5 % per bulan,” kata Bachrul Chairi kepada para peserta dari para petani, gapoktan, koperasi, mahasiswa dan juga pihak terkait dengan SRG.

Pembiayaan Resi Gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, Bank Lampung, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun Lembaga Keuangan Non-Bank yaitu PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM. Total nilai pembiayaan yang telah diberikan sampai 30 Juni 2017 sebesar Rp. 297,3 miliar.

Lebih jauh Bachrul Chairi menjelaskan sebagai suatu sistem yang memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis, upaya pelaksanaan

SRG tidak lantas berjalan tanpa tantangan. Tantangan yang paling penting adalah menjaga integritas SRG di mata masyarakat, pelaku usaha maupun lembaga keuangan. “Belum terselenggaranya mekanisme jaminan yang mencakup seluruh potensi kerugian dalam pelaksanaan SRG menjadi batu sandungan tersendiri bagi SRG guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif,” ujarnya.

Regulasi untuk jamin kepercayaan

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pelaksanaan SRG, pemerintah telah membuat regulasi yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pemangku kepentingan serta mendorong tumbuhnya peluang dan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha. Yang pada gilirannya akan menciptakan sebuah sistem yang dapat dipercaya

oleh pelaku SRG maupun lembaga keuangan.

Regulasi itu telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai lembaga Pelaksana Penjaminan tersebut. Perum Jamkrindo bertugas mengelola Dana Jaminan yang melindungi pemilik barang maupun lembaga pembiayaan dari risiko yang dapat terjadi akibat wanprestasi atau ketidakmampuan Pengelola Gudang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang sebagaimana tertera pada Resi Gudang.

Dengan adanya Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG, petani dan para pelaku usaha lainnya menjadi lebih yakin dan merasa aman untuk memanfaatkan SRG. Lembaga keuangan juga tidak lagi ragu dalam memberikan pembiayaan SRG, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah yang akan berdampak secara nasional.

SRG tekan inflasi daerah

Pemerintah berkepentingan mengembangkan SRG di daerah. Karena fluktuasi harga komoditas khususnya pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi secara nasional. Implementasi SRG secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditi pangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

Di lain sisi, pintu perdagangan antar negara ASEAN semakin terbuka lebar sejak diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada Desember 2015. Hal ini mengharuskan Indonesia mengkondisikan diri menghadapi berbagai laju transaksi barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara yang semakin ramai dan meningkat.



Kondisi ini tentunya tidak hanya merupakan ancaman, melainkan juga memberikan harapan dan peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas produk maupun komoditas dalam negeri harus terus dilakukan melalui penciptaan suatu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha baik UKM maupun pabrikaan untuk menambah *cash-flow*, sehingga tetap mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan walaupun modal yang dimiliki terbatas.

SRG ternyata juga mampu menjadi solusi yang efektif untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2011, Indonesia memiliki instrumen keuangan dan perdagangan yang memberikan pilihan bagi Petani, UKM maupun pelaku usaha lainnya untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan agunan hanya resi gudang.

SRG mereposisikan kembali komoditas pertanian sebagai suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan layak dipergunakan sebagai jaminan guna memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan

jaminan lainnya seperti *fixed asset* [tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan sebagainya]. Instrumen ini merupakan komitmen pemerintah guna memberdayakan petani maupun UKM kita yang kurang memiliki posisi tawar dan terbatasnya pilihan selain menjual hasil budi dayanya pada saat panen raya dengan harga yang umumnya sedang berada pada titik terendah, bahkan tidak jarang petani kita melakukan penjualan sebelum panen.

“SRG memiliki peran lebih dari sekadar tunda jual dan pembiayaan. SRG mampu menjaga harga tidak jatuh [stabil], memutus rantai pasok pedagang yang panjang, dan menjadikan pemenuhan standar mutu menjadi suatu kebutuhan. Melalui SRG, pemenuhan komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat dan keuntungan di tingkat petani dapat terwujud, *over supply* atas hasil panen dan defisit komoditas dapat dikelola dengan baik,” tambah Bachrul Chairi.

Selain itu, dengan adanya Sistem Informasi pada SRG, ketersediaan data dan sebaran stok cadangan komoditas menjadi akurat dan tidak diragukan validitasnya. Melalui Sistem Informasi ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan penyebaran dan penyediaan bahan pangan di daerah-daerah dalam menciptakan kedaulatan pangan nasional.



Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Segera Dilaksanakan

Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui pasar lelang sangat membantu UKM mendapatkan akses langsung gula dari penjual secara transparan

Jalan berliku lelang Gula Kristal Rafinasi [GKR] menemukan sosoknya. Menyusul dipilihnya PT. Pasar komoditas Jakarta [PKJ] sebagai penyelenggara lelang GKR berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti], Bachrul Chairi, menegaskan lelang GKR dapat segera dilaksanakan, paling lambat awal Oktober 2017.

Semestinya lelang GKR dilakukan bulan Juni lalu. Namun, Kementerian Perdagangan [Kemendag] menundanya hingga awal Oktober 2017. "Menteri Perdagangan melihat sosialisasi

lelang tampaknya masih kurang. Pemahamannya masih belum sama. Kami saja masih belum sama, apalagi di daerah," ujar Bachrul Chairi di Auditorium Utama Kemendag, Senin [10/7].

Selama penundaan Kemendag membuka diri jika publik ingin memberikan masukan demi kelancaran pelaksanaan lelang nantinya. Di saat yang bersamaan, Kemendag juga akan melakukan persiapan yang lebih matang.

Pasar lelang GKR merupakan pasar lelang elektronik yang menggelar transaksi jual beli gula kristal rafinasi secara *online* dan *real time* dengan metode Permintaan Beli [Bid] dan Penawaran Jual [Offer]. Adapun, volume penjualan atau pembelian sebanyak 1 ton, 5 ton, dan 25 ton.

Melalui mekanisme pasar lelang komoditi. Perdagangan GKR bagi industri makanan dan minuman [mamin] di Indonesia sekarang menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan langsung oleh pelaku industri.

Menurut Bachrul, pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang diharapkan dapat menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh GKR. "Pengaturan perdangan GKR melalui pasar lelang dapat meningkatkan daya saing usaha. Mekanisme pasar lelang GKR ini sangat membantu IKM/UKM mendapatkan akses langsung GKR dari penjual dengan harga pasti dan transparan karena sistem ini memotong jalur distribusi," tegasnya.

E-barcode pengawasan lebih akurat

Dengan sistem ini, pengawasan yang dilakukan Pemerintah lebih akurat karena sistem ini dilengkapi barcode elektronik [e-barcode]. Kode yang terkandung dalam e-barcode mengandung informasi dan *history* perdagangan GKR yang lengkap dan akurat, mulai dari proses importasi bahan baku, produksi,

penjualan, pembelian, serta distribusi gula.

Ia menjelaskan, sistem perdagangan satu pintu melalui pasar lelang *online* yang dilengkapi dengan e-barcode akan memudahkan dalam melakukan pengawasan perdagangan gula yang lebih akurat dan akuntabel. Perdagangan GKR melalui pasar lelang tidak mengubah kegiatan bisnis industri pengguna GKR.

Hanya terdapat perubahan pencatatan menjadi secara elektronik [online] pada sistem yang dibangun, sehingga dapat mempermudah pengawasan GKR yang beredar. Proses penyelenggaraan lelang GKR secara online ini dalam waktu dekat akan disosialisasikan PT PKJ ke beberapa wilayah di Indonesia.

Mekanisme lelang akan memberikan dampak positif bagi Usaha Kecil dan Menengah [UKM] yang menggunakan sekitar 30 persen dari produksi gula kristal rafinasi. Pemerintah menjadikan pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah bagi para pelaku usaha kecil. Misalnya, jika mereka tidak memiliki badan hukum, maka para UKM itu bisa membuat kelompok untuk kemudian ikut lelang gula rafinasi, dengan pembelian minimal satu ton.

Jika sudah berjalan, kelompok UKM yang belum berbadan hukum itu akan diawasi oleh Kemendag guna memastikan tidak ada penyelewengan penggunaan gula kristal rafinasi [GKR] yang mengakibatkan rembesan ke pasar konsumsi.

Lelang online GKR membentuk kesetaraan

Dengan adanya pasar lelang GKR ini para UKM atau IKM [industri kecil dan menengah] dapat memperoleh bahan baku untuk meningkatkan kualitas produk mereka. "Selama ini industri makanan kecil menggunakan gula kristal putih sebagai campurannya. Itu seminggu sudah jamuran, tidak tahan lama. Tapi kalau gunakan gula kristal rafinasi, kualitasnya lebih bagus dan lebih tahan lama. Masalahnya, selama



ini mereka tidak punya akses untuk memperoleh gula rafinasi itu. Yang bisa mengakses adalah industri makanan dan minuman besar," jelas Bachrul Chairi.

Selain masalah akses untuk mendapatkan GKR, survei yang dilakukan PT Surveyor Indonesia menyatakan selama ini sekitar 300-400 ribu ton GKR bocor ke pasar. Dari gula yang merembes ke pasar inilah para UKM membeli gula rafinasi dengan harga Rp1.500-3.000 per kg lebih mahal daripada GKR yang dibeli pengusaha besar. "Memang lebih mahal, karena itu di pasar gelap. Belum lagi kalau mereka ketangkap polisi, mereka bisa ditahan. Itu pembeliannya tergolong ilegal," ungkap Bachrul.

Melalui pasar lelang GKR yang dilakukan secara *online* diharapkan akses para pengusaha kecil dan menengah bisa diatasi, sehingga produksi industri kecil dan menengah bisa berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan sistem lelang ini pemerintah juga tidak

akan mengalami kesulitan soal data peredaran GKR di pasaran maupun memantau kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengungkapkan apresiasinya atas dukungan DPR terhadap pemberlakuan pasar lelang gula rafinasi ini. "DPR berpesan agar pengawasannya betul-betul dijaga, agar IKM [Industri kecil dan menengah] mendapatkan kebutuhan gula mereka, dan tidak terjadi lagi perembesan. Itu pesan mereka" tambah Bachrul.

Kepala Bappebti Layani Wawancara Khusus Dengan Beberapa Media



Menyadari pentingnya diseminasi informasi melalui media massa, Bappebti secara reguler mengundang beberapa media untuk melakukan wawancara. Seperti pada Kamis [20/7] Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, didampingi oleh Kepala Biro Peraturan Perundang - Undangan dan Penindakan, Sri Hariyati, melakukan wawancara dengan wartawan baik media cetak maupun elektronik menjelaskan perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan kebijakan-kebijakan Bappebti untuk meningkatkan transaksi multilateral, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menangkali investasi ilegal di bidang PBK.

Bappebti Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BKDI

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi bersama dengan Sekretaris Bappebti, Nusa Eka dan Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu dan Pejabat Eselon III dan IV terkait melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) KH Said Aqil Siradj, Jumat [07/07]. Dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan ini, kepada KH Said Aqil Siradj yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PBNU, ditanyakan mengenai Visi dan Misi dalam pengembangan Industri Perdagangan Berjangka khususnya di PT BKDI.



Tim PPNS Bappebti Dampingi Polresta Surakarta

Bappebti memenuhi permintaan Kapolresta Surakarta, Jawa Tengah, untuk melakukan pendampingan kasus yang tengah ditangani tentang dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh CV Kebun Emas Indonesia. Tim Penyidik PPNS Bappebti yang terdiri dari Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi, serta pejabat Eselon IV terkait pada tanggal 4 Juli 2017 telah turun ke lapangan melakukan pendampingan tersebut. Dugaan sementara CV Kebun Emas Indonesia telah melakukan perekrutan nasabah investasi logam mulia dan dananya digunakan dalam aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).



Silaturahmi dan Halal Bihalal Bappebti : Idul Fitri 1438 H



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi bersama Jajaran Eselon II Bappebti serta seluruh pegawai Bappebti mengadakan acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1438 H yang diselenggarakan di Gedung Bappebti Kementerian Perdagangan. Jumat [7/07]. Dalam kesempatan ini Kepala Bappebti memberikan pengarahan agar pegawai Bappebti tetap menjaga integritas dan meningkatkan semangat kerja. Kegiatan rutin tahunan ini merupakan apresiasi Pimpinan Bappebti Kemendag terhadap karyawan/ti yang merayakan Idul Fitri serta untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih erat antara pimpinan/pejabat dengan para karyawan.



Diseminasi Peraturan di Bidang PBK Terkait Program APU/PPT

Langkah pencegahan tersebut, menurut Bachrul Chairi, salah satunya dilakukan melalui analisis *National Risk Assesment* [NRA] dan *Sectoral Risk Assesment* [SRA] terhadap para calon nasabah dan juga nasabah perusahaan PBK. Ke depannya, Bappebti akan melakukan evaluasi dan pengawasan serta penegakan atas pelaksanaan program APU/PPT di masing-masing Pialang Berjangka.

Dalam kesempatan ini Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati, menyampaikan implementasi NRA dan SRA pada industri PBK merupakan salah satu syarat yang dipenuhi dalam rangka persiapan *Mutual Evaluation Review* [MER] tahun 2017. MER akan menilai kepatuhan rezim APU/PPT Indonesia dalam melaksanakan Rekomendasi *Financial Action Task Force* [FATF] yang merupakan standar global dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme.

Peran perusahaan pialang berjangka sangat penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [TPPU] dan Pendanaan Terorisme. Hal ini dikemukakan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, saat membuka acara ‘Diseminasi Peraturan di bidang PBK [Perdagangan Berjangka Komoditi] yang terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [APU/PPT]’ di Gedung Bappebti, Jakarta, Kamis [20/7].

Demi Produsen Kopi Kedua Dunia, Indonesia Berguru ke Vietnam

Bicara soal kopi, Indonesia punya mimpi indah yang diyakini bisa diwujudkan, yakni menjadi produsen kopi nomor dua di dunia menggeser Kolombia yang saat ini bertengger di posisi ini. “Kita sekarang berada pada urutan ke-4 setelah Brasil, Kolombia, dan Vietnam. Mimpi kita bisa menjadi nomor 2,” ujar Amran saat Rapat Kerja RAPBN-P 2017 dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Senin [24/7].

Kopi merupakan salah satu unggulan Indonesia dan masuk dalam Sistem Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bappebti. Untuk meraih posisi kedua tersebut Indonesia akan belajar dari Vietnam guna meningkatkan produksi kopi di dalam negeri. Kementerian Pertanian menyatakan akan fokus untuk melakukan penyaluran benih dan bibit kopi kepada para petani. Dijelaskan bahwa produksi kopi Indonesia mencapai 0,6 ton per hektar per tahun. Ditargetkan produksinya bisa meningkat 1 ton per ha per tahun. Dengan produktivitas seperti itu diyakini Indonesia mampu menjadi produsen kopi nomor 2 terbesar di dunia.



Mendag Kunjungi PZ Wilmar di Nigeria

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, baru saja melakukan kunjungan kerja ke Nigeria. Dalam rangkaian kegiatan di salah satu negara Afrika itu, Enggartiasto berkunjung ke PZ Wilmar, salah satu perusahaan di Nigeria yang menggunakan CPO Indonesia.

Berdiri sejak 2010, PZ Wilmar adalah perusahaan joint venture antara Wilmar International dan PZ Cussons International. PZ Wilmar mengambil kebutuhan bahan baku CPO sebanyak 80 persen dari Indonesia dengan total impor sebanyak 8.000 ton per bulan. Namun, perusahaan tidak dapat maksimal dalam penyerapan bahan baku akibat tingginya bea masuk CPO di Nigeria. Jika tidak ada hambatan, impor CPO untuk kebutuhan bahan baku PZ Wilmar dapat menyerap 30.000 ton per bulan.

Selain ke PZ Wilmar, Mendag yang didampingi Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional [PEN], Arlinda Jazid,



Direktur Perundingan Bilateral Made Marthini, Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional Sri Nastiti Budianti, dan Direktur P2IE Tuti Prahastuti melakukan kunjungan ke *Free Trade Zone* di Nigeria yang kawasan industri dan pelabuhan yang bebas pajak, Senin [24/7].



Kaltim Sertifikasi 1,3 Juta Bibit Tanaman Perkebunan

sawit, 40.170 kecambah aren, 7.570 bibit aren, 49.437 stek lada, 14.850 bibit lada, dan 66.550 bibit karet.

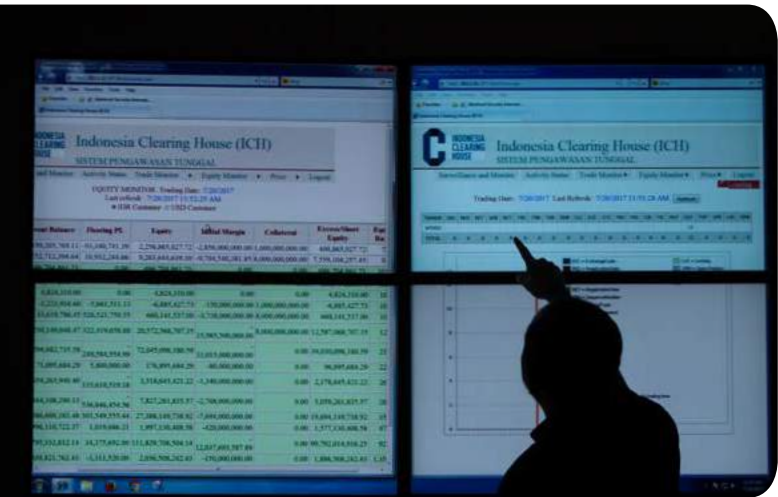
Ujang Rachmad mengatakan benih merupakan faktor awal sekaligus faktor kunci dalam keberhasilan usaha perkebunan. Karena jika bibit atau benih yang diperoleh tidak berkualitas, maka hasil panen yang diperoleh dipastikan minim, bahkan bisa tidak produksi.

“Sertifikasi benih dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap bibit atau benih perkebunan, terutama kelapa sawit. Banyak petani sawit yang tanamannya tidak berbuah karena benih diperoleh bukan dari hasil sertifikasi,” tutur Ujang Rachmad, Senin [17/7].

Sepanjang periode Januari-Juni 2017 Dinas Perkebunan [Disbun] Provinsi Kalimantan Timur [Kaltim] berhasil melakukan sertifikasi terhadap 1.290.969 bibit tanaman perkebunan baik berupa kelapa sawit, lada, aren, maupun karet.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Ujang Rachmad, di Samarinda, sertifikasi ini dilakukan petugas teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas [UPTD] Pengawasan Benih Perkebunan [PBP] dengan rincian 583.118 kecambah kelapa sawit, 529.274 bibit kelapa

Bappebti Increase Supervision of Illegal Futures Trading Sites



Fraud under the guise of investments has penetrated into various type of businesses, not least commodity futures trading. Head of Bappebti [CoFTRA, Commodity Futures Trading Regatory Agency], Bachrul Chairi, in Jakarta, Wednesday [19/7], revealed during the last two years there

Government Fight for National Interests

The Indonesian government would fight to defend national interests to face international pressure to Indonesian palm oil product exports in relation with environmental issues which have been appeared by the French government. The French government has a plan to restrict the import of palm oil for biofuels production to reduce deforestation in palm oil-producing countries. It is worried that this will be followed by other European countries to do same policies. As we know Indonesia is a great exporter of palm oil products. According to the Association of Indonesia Palm Oil Companies, in 2016 Indonesia exported crude palm oil and its derivatives about 21.5 million tons to the world, contributed about US\$18.1 billion towards the nation's foreign exchange. About 4.37 tons of palm oil was exported to European Union, its second largest market after India. Secretary General of Ministry of Trade Karyanto Suprih said in Jakarta, Friday [7/7/2017], the French

is a tendency to increase the growth of future industry. Bachrul gives an overview of transactions in 2016, for example, reaching 7 million lots. However, that number is estimated at only 40 percent of the actual contract. "So, there are 60 percent that are not recorded. This is because the role of illegal brokers are overseas companies operating in Indonesia through introducing broker [IB]. They do not have permission from Bappebti," explained Bachrul. Their companies are in China, Singapore, Malaysia, and a number of other countries, but do not have offices in Indonesia. Here they just ride the address and create a website similar to a legal company that already operates, as if they are also a legal company. Bappebti conducted an investigation and in cooperation with the Ministry of Communications and Informations [Kominfo]. Bappebti blocked online sites suspected of illegally collecting funds from the public. Bachrul asserted Bappebti will increase the frequency of supervision of futures trading sites that seek to withdraw funds from the public.



plan would be discussed by some ministries to take the best policies and options. "Maybe, now is environmental issues, but tomorrow it could be different," Karyanto said. He added that the Indonesian government has done many things to solve environmental problems.

Minister Enggartiasto: The Rice Stock is Abundant



Trade Minister Enggartiasto Lukito stated that the rice stock would be sufficient to meet the demand for the next seven months. The State Logistic Agency [Bulog] is holding 1.7 million tons of supply curently. "The rice stock, based on our preliminary data, is abundant. It would be more accurate if traders reported their stock position and updated the data regularly," he said in Jakarta, on Tuesday [4/7/2017]. Enggartiasto revealed that the government had collected accurate data on the rice supply, especially of those held in private warehouses. The Trade Minister has required traders to regularly report their stock to improve national rice trade mechanism. "The deadline for traders to register their warehouses, as well as the rice stock, is the end of July," he said. As quoted by antaranews.com, President Director of the State Logistic Agency Djarot Kusumayakti explained that the Agency had 1.7 million tons of rice stock, of which some 1.3 million tons would be allocated for the beneficiaries of the prosperous rice program.

"It means that until the end of the year, if there is no more supply absorption, we will still have 400,000 tons of stock," Djarot revealed. He added that with the beginning of the second harvesting season, Bulog was expected to take in some 1-1.25 million tons of rice up to the end of the year. By the end of 2017, the agency would have 1.6 to 1.7 million tons of rice stock. "If all could run as expected, until peak harvesting season in 2018, we would still have adequate stock," he noted.

Glossary

- At the Market**
An order to buy or sell a futures contract at whatever price is obtainable when the order reaches the trading floor. Also called a Market Order.
- Auction Market**
A market in which the price of a security is determined by supply and demand, through a continuous auction. Exchanges are auction markets.
- Audit Trail**
The record of trading information identifying for example, the brokers participating in each transaction, the firms clearing the trade, the terms and time of the trade, and, ultimately and when applicable, the customers involved.
- Auditor's Report**
The public accountant's statement as to the scope of the review of the books and records of the corporation and the accountant's opinion as to the accuracy of the financial statements (i.e., unqualified or to some degree qualified approval).

- Automatic exercise**
The exercise by the clearing house of an in-the-money option at expiration, unless the holder of the option submits specific instructions to the contrary.
- Calendar Spread**
The sale of an option with a nearby expiration against the purchase of an option with the same strike price, but a more distant expiration. The loss is limited to the net premium paid, while the maximum profit possible depends on the time value of the distant option when the nearby expires. The strategy takes advantage of time value differentials during periods of relatively flat prices.
- Call**
The period at market opening or closing during which futures contract prices are established by auction.
- Call Option**
A contract giving the buyer the right to purchase something within a certain period of time at a specified price. The seller receives money [the premium] for the sale of this right. The contract also obligates the seller to deliver, if the buyer exercises his right to purchase.

Tomi Setiawan

Kasubag. Pemberdayaan Pelaku Sistem Resi Gudang
Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG & PLK, Bappebti

Ini Bukan Soal Bangun Gudang, Tapi Membangun Perubahan

Daerah mana yang paling identik dengan Jagung ? Mendengar pertanyaan tersebut, maka yang terlintas di benak saya pertama kali adalah Gorontalo. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Gubernur pertamanya, Fadel Muhammad, yang mengangkat jagung sebagai komoditas unggulan provinsi ini. Bukan karena produksi jagungnya yang paling tinggi, tapi karena Gorontalo-lah yang berhasil menjadi sentra pemasaran jagung bahkan hingga ke pasar internasional, sehingga hanya dalam waktu “seumur jagung” di awal masa kepemimpinannya, pendapatan per kapita Propinsi Gorontalo meningkat nyaris 3 kali lipat dari Rp1,2 juta pada 2001 menjadi Rp3,5 juta pada 2006.

Pada tahun 2009, pemerintah melalui Dana Stimulus Fiskal Kemendag melakukan pembangunan 41 gudang komoditas pertanian yang tersebar di 34 kabupaten/kota, dimana Gorontalo adalah salah satunya. Namun berbeda dengan daerah lainnya, untuk 6 daerah sentra produksi jagung, gudang yang dibangun berjenis *Silo*.

Apa yang menarik dari *Gudang Silo* ? Gudang jenis ini termasuk dalam gudang yang berteknologi. Misal dari kapasitasnya, kapasitas gudang ini dapat diperbesar dengan cukup menambahkan lempengan tahan karat ke atas, sehingga *Silo* akan semakin tinggi dan *volume* penyimpanan semakin besar. Tentu hal ini harus didukung pondasi yang memadai. Untuk menjaga kelembaban udara

di dalam tabung, *Silo* juga dilengkapi dengan mesin *blower* yang otomatis dapat berhembus ketika suhu atau kelembaban di dalam tabung mulai mencapai titik tertentu. Belum lagi metode penyimpanan bercampur dengan pola FIFO (*First In First Out*), dengan pola ini komoditas yang disimpan akan selalu baru sehingga sangat dimungkinkan Resi Gudang tidak lagi memiliki masa jatuh tempo, sama seperti praktek SRG di Amerika Serikat. Namun lagi-lagi, agar pemanfaatan *Silo* bisa optimal, masih ada sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Saat tulisan ini saya buat, SRG Jagung di Gorontalo baru saja berjalan dalam hitungan hari. Sejak mulai selesai dibangun pada 2010, *Silo* sempat terbengkalai. Bukan karena tidak ingin dimanfaatkan, tapi karena pada awal pemanfaatannya, pihak Pengelola Gudangnya sempat masuk bui karena dianggap melakukan penimbunan minyak tanah yang memang dibutuhkan untuk bahan bakar mesin pengering. Menariknya, Pengelola Gudang tidak lantas putus semangat. Upaya pemanfaatan fasilitas yang sudah dibangun pemerintah tersebut terus dilakukan.

Salah satu yang cukup unik, Pengelola Gudang tidak memperkenalkan SRG sebagai instrumen tunda jual dan pembiayaan. Saat SRG belum berjalan, Pengelola Gudang melakukan pembelian jagung dari petani dengan harga



sedikit lebih tinggi dari harga pasar saat itu. Hal ini dilakukan karena Pengelola Gudang menilai harga beli pedagang pengumpul terlalu rendah, menaikkan harga justru akan memberikan keuntungan lebih banyak tidak hanya petani tetapi juga bagi pembeli perantara. Jagung yang mereka beli lalu dikeringkan dan disimpan. Pada saat harga jagung meningkat, Pengelola Gudang melakukan penjualan, dan selisih penjualan diberikan kembali ke para Petani. Pola inilah yang mengawali pengenalan petani jagung Gorontalo dengan *Silo* SRG. Bahwa *Silo* SRG bukanlah bangunan gudang biasa, namun sarana pemberian nilai tambah untuk komoditas mereka dimana mereka dapat memperoleh nilai lebih tinggi melalui pengeringan dan penyimpanan/tunda jual. Pengelola Gudang juga membantu melakukan penjualan, sehingga membantu penjualan komoditas petani. Pola hubungan yang dibangun antara Pengelola Gudang dengan para Petani Penyimpan bersifat Kemitraan.

Sebaik, selengkap dan secanggih apapun gudang yang dibangun, tidak akan ada artinya tanpa pemanfaatan yang optimal. Pembangunan gudang SRG belum selesai ketika seluruh bangunannya selesai dibangun, karena tujuan pembangunan gudang SRG adalah “Membangun Perubahan”.

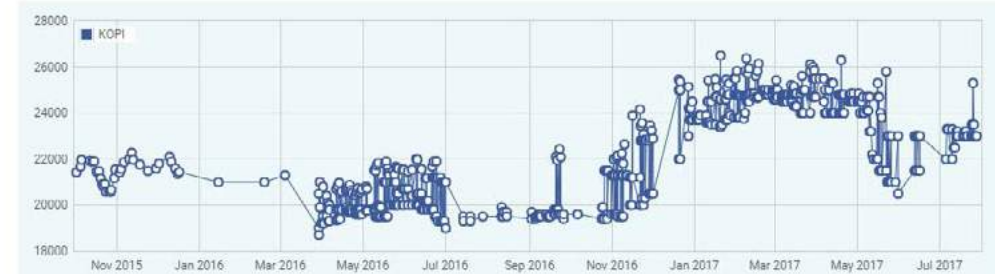


Grafik Harga Komoditi BERSAS MEDIUM (Tingkat Nasional) Dari Sumber Lainnya Pada Wilayah JAKARTA

http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_pedagang



Harga beras secara nasional sepanjang tahun 2017 stabil. Misalnya, beras premium di Jakarta kisaran harganya antara Rp10.500 hingga Rp10.700 per kg. Stabilitasnya harga beras ini disebabkan pasokan beras dari petani cukup, panen tidak terjadi secara menumpuk sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi dan juga tidak terjadi paceklik sehingga produksi di tingkat petani berlangsung lancar. Selain itu pemantauan dari pemerintah juga terus berjalan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga beras ini.



Grafik Harga Komoditi KOPI Ditingkat Petani Wilayah LAMPUNG

http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_pedagang



Harga kopi di Lampung, yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi utama di Indonesia, sepanjang Januari hingga Mei 2017 stabil dengan kisaran harga antara Rp24.000-Rp25.000 per kg. Pada bulan Juni harga kopi di daerah ini sempat turun hingga Rp21.000 per kg. Namun pada bulan Juli terlihat grafik harga kopi di tingkat petani ini menunjukkan kondisi yang naik kembali dengan harga sekitar Rp23.000 per kg. Diperkirakan harga kopi beberapa bulan ke depan akan stabil membaik. Ketua Umum GAEKI [Gabungan Eksportir Kopi Indonesia], Hutama Sugandhi, kepada pers menyatakan bahwa produksi kopi di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu naik sekitar 10 persen. Ketiga daerah itu dikenal sebagai segitiga emas penghasil kopi utama di Indonesia. Diperkirakan tahun 2017 produksinya mencapai 660 ribu ton. GAEKI memperkirakan pasar kopi nasional dan ekspor masih sangat besar, karena jumlah pencinta kopi makin bertambah seiring meningkatnya tren minum kopi masyarakat Indonesia dan dunia.

Rina Oktaviani

Guru Besar dan Ketua Internasional Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS)
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Kendala Dan Faktor Utama Keberhasilan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

Implementasi SRG diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional.



Permasalahan yang biasa terjadi pada usahatani di Indonesia adalah turunnya harga pada saat panen karena petani segera menjual produknya. Penyimpanan hasil panen tidak dilakukan petani karena petani menginginkan uang segera untuk memenuhi

membaik, melunasi kredit, dan mendapat sisa uang hasil penjualan. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif Program Pemerintah dalam menjaga stok pangan, peningkatan kualitas produk dan stabilisasi harga.

Implementasi SRG diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional. Dampak yang nyata dapat dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan petani melalui harga jual yang lebih baik, tumbuhnya industri pergudangan di daerah, serta berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan. Disamping itu implementasi SRG juga akan memberikan dampak tidak langsung seperti tumbuhnya pola kemandirian usaha dan *enterpreneurship* pada petani dan pelaku usaha.

Pelaksanaan SRG di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 kemudian diubah oleh UU No.9 Tahun 2011 dengan komoditas gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam. Dalam perkembangannya, implementasi SRG ternyata belum sebaik yang diharapkan. Hingga tahun 2016, jumlah gudang pemerintah yang telah memperoleh izin dari Bappebti yaitu sebanyak 80 gudang dimana sebanyak 65 gudang telah menerbitkan Resi Gudang [81%]. Jumlah resi gudang yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan masih tergolong minim yaitu hanya sebesar 59.3% [1929 resi gudang] dari total resi gudang yang diterbitkan [Bappebti, 2016].

Dari 10 komoditas dalam skema SRG, telah diterbitkan Resi Gudang untuk 7 komoditi yaitu Gabah, Jagung, Beras, Kopi, Rumput Laut, Kakao dan Rotan. Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan paling banyak kumulatif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 adalah komoditi Gabah [75,8%], Beras [11,3%], Jagung [3,9%], Kopi [7,5%], Rumput Laut [0,9%],

kebutuhan hidup dan membayar biaya usahatani sebelumnya yang biasanya dipinjam dari para tengkulak dan pedagang. Berbagai program pemerintah sudah dilakukan seperti Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan Program SRG, petani bisa menunda penjualan hasil panen dengan menyimpannya di gudang terakreditasi dan mendapatkan dokumen resi gudang sebagai jaminan kredit di bank. Petani dapat menjual pada saat harga pasar telah



Kakao [0,01%] dan Rotan [0,05%]. Sedangkan untuk nilai pembiayaan Resi Gudang tertinggi adalah Gabah [77,4%], Beras [11,2%], Jagung [3,8%], Rumput Laut [0,4%], dan Kopi [7,2%] [Bappebti, 2016].

Pelaksanaan SRG masih menemui beberapa kendala, diantaranya adalah:

[1] kurangnya pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha [petani, poktan, gapoktan dan koperasi], [2] belum ada pihak yang siap membeli komoditas dengan harga yang dapat diterima, [3] besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG, [4] bank memiliki alternatif pembiayaan lain yang lebih menguntungkan misalnya kredit komersial atau kredit lain, [5] standar kualitas hasil panen yang tidak seragam, [6] keterbatasan referensi harga komoditas dan [6] belum optimalnya sinergi kebijakan instansi terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian Haryotejo [2013] yang menemukan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pilot project SRG adalah koordinasi antar *stakeholders*; Bank, Gudang dan Koperasi dan juga hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi, serta likuiditas kredit yang tidak berjalan dengan baik. Sementara itu kajian Kementerian perdagangan [2014] menunjukkan bahwa implementasi SRG untuk komoditi lada di propinsi Lampung dan Bangka belum siap baik dari sisi pelaku usaha, kelembagaan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Empat faktor kunci agar implementasi

SRG komoditi lada dapat terwujud, yaitu adanya komitmen kepala pemerintah daerah, terintegrasinya kelembagaan dalam satu tempat, edukasi dan sosialisasi, peningkatan produksi dan mutu serta terdapatnya *buyer*/pasar lelang.

Studi Listiani dan Haryotejo [2013] menunjukkan keberhasilan pelaksanaan SRG di Kabupaten Tuban karena tersedianya sarana dan prasarana gudang yang mendukung serta pengelolaan gudang yang *relative* sudah baik dikelola oleh PT. Pertani. Selain itu adanya himbauan langsung dari Bupati Kabupaten Tuban bagi para petani jagung yang potensial untuk memanfaatkan gudang penyimpanan.

Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan implementasi SRG, diperlukan program terstruktur yang menjadi komitmen dari seluruh pelaku/*stakeholder* SRG [petani, poktan, gapoktan, koperasi, Bappebti, pengelola gudang, Pemerintah Daerah, Kementrian/lembaga terkait, perbankan, dan Bank Indonesia] dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemanfaatan SRG di Indonesia.

Dalam rangka mensukseskan implementasi SRG di Indonesia, beberapa wilayah telah dijadikan sebagai *pilot project* peningkatan pemanfaatan sistem resi gudang [SRG] diantaranya yaitu Indramayu, Banyumas, Jombang, Kuningan untuk komoditas gabah, Gowa untuk komoditas jagung, Konawe Selatan untuk komoditas kakao. Dalam implementasinya kendala

yang dihadapi oleh masing-masing komoditas SRG berbeda tergantung dari karakteristik komoditas, aset pengelola dan struktur pasar. Untuk komoditas pertanian seperti gabah misalnya, syarat minimal *volume* gabah [10 ton] menjadi permasalahan utama yang sulit dipenuhi oleh petani karena kepemilikan lahan yang kecil [sekitar 0,2 ha/petani]. Sedangkan untuk komoditas perkebunan khususnya kakao, tidak adanya insentif harga untuk menjual kakao dalam bentuk fermentasi membuat implementasi SRG sulit berkembang.

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik antar komoditas SRG, berdasarkan hasil studi Departemen Pengembangan UMKM BI dan ITAPS-FEM IPB [2016] yang dilakukan pada *pilot project* SRG Gabah di Kuningan dan Coklat di Konawe Selatan, secara umum faktor utama keberhasilan [*key success factors*] implementasi SRG yaitu: [1] aktor utama **Poktan/Gapoktan sebagai** pemilik barang yang bersedia barangnya disimpan di gudang, [2] **pengelola** harus mempunyai **kemampuan manajerial** yang baik dan **berjiwa entrepreneur** sehingga mampu bersaing dengan pedagang pengumpul, [3] **dukungan pemerintah** daerah termasuk **koordinasi antar stakeholders** baik di tingkat daerah maupun pusat [antara lain Bappebti, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan], [4] **mekanisme transisi** yang lebih detail untuk peralihan dari pendamping ke calon pengelola gudang, [5] penyediaan **anggaran APBD** untuk pendampingan pengelola, monitoring dan evaluasi, serta penyediaan sarana dan prasarana, dan [6] pembangunan **sistem informasi resi gudang** berupa sistem informasi harga, sistem informasi pengawasan barang, dan lainnya. Pengembangan SRG *online* serta pasar lelang komoditi dapat menjadi fokus utama pengembangan SRG dalam skala yang lebih luas.



F. Wishnubroto

Ketua Umum Aspebtindo

"Aspebtindo melakukan konsolidasi bersama anggota untuk meningkatkan integritas dalam industri perdagangan berjangka komoditi"

Antara Konsolidasi dan Citra

Memasuki kantor Aspebtindo kesan pertama yang muncul adalah kesederhaan. Di lantai 9 Gedung Graha Mandiri, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, hanya beberapa puluh meter saja dari Bundaran HI yang terkenal itu, terpampang tulisan Aspebtindo [Asosiasi Perdagangan Berjangka Indonesia]. Disinilah para pelaku perdagangan berjangka berhimpun untuk mengembangkan bisnis yang masih terbuka lebar peluangnya ini.

Aspebtindo terbentuk sejak dua tahun lalu dan memilih F. Wishnubroto sebagai ketua umumnya. "Anggota Aspebtindo mencakup seluruh pelaku usaha yang bergerak dalam industri perdagangan berjangka. Mereka wajib menjadi anggota. Inilah yang kami syukuri, karena dengan berada dalam satu wadah yang sama koordinasinya menjadi lebih mudah," ujar Wishnubroto kepada Buletin Bapebti, akhir Juli lalu.

Para anggota Aspebtindo meliputi dua bursa berjangka, dua lembaga kliring berjangka, 51 perusahaan penyelenggara SPA [sistem perdagangan alternatif] tipe A, 15 pialang berjangka SPA tipe B dan 6 tipe C serta para wakil pialang yang berjumlah 1.125, sehingga totalnya sekitar 1.200 anggota. Jumlah terbanyak adalah wakil pialang, yakni perorangan yang berhubungan langsung dengan para nasabah.

Aspetindo berdiri sejak 24 April tahun 2015, jadi baru dua tahun lebih berjalan. Sebagai organisasi yang belum lama terbentuk apa yang dilakukan Aspebtindo saat ini lebih ditekankan pada konsolidasi sesama anggota untuk meningkatkan integritas dalam industri perdagangan berjangka ini. Selain itu Aspebtindo juga fokus melaksanakan sosialisasi pelatihan untuk para pelaku usaha perdagangan berjangka,

terutama untuk menggenjot transaksi multilateral yang memang menjadi perhatian semua pihak dalam industri perdagangan berjangka.

"Semua pihak terkait dengan perdagangan berjangka ingin meningkatkan transaksi multilateral, volume ditingkatkan dan kualitasnya dibentuk, sejalan dengan transaksi – transaksi berjangka lainnya," kata Wishnu. Selama ini volume transaksi didominasi perdagangan alternatif, padahal multilateral merupakan awal perdagangan berjangka. Ditanya mengenai penyebabnya, Wishnu menjawab karena banyak hal. Antara lain, dalam multilateral semua transaksi terjadi di lantai bursa sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak saling mengetahui, sementara transaksi SPA [sistem perdagangan alternatif] langsung *head to head* antara penyelenggara SPA dan nasabah.

Transaksi multilateral terjadi karena adanya pergerakan harga, tapi selama ini hanya sedikit saja pergerakan harga itu terjadi. "Nah, disinilah Aspebtindo bersama pihak terkait lain dalam berdagang berjangka untuk bergandeng tangan mencari upaya bagaimana meningkatkan transaksi multilateral," katanya lagi. Pihak regulator meminta agar para pedagang berjangka bisa memberikan kontribusi 5 persen transaksi multilateral. "Dari segi volume perdagangan belakangan ini terlihat terjadi peningkatan, tapi dari segi kualitas transaksi masih belum. Karena itu diharapkan melalui Aspebtindo kualitas transaksi multilateral bisa ditingkatkan," tambah Wishnu.

Peningkatan transaksi multilateral menjadi bagian tantangan yang harus dijawab oleh Aspebtindo. Karena melalui transaksi multilateral akan terjadi pembentukan harga, satu hal yang menjadi dambaan bagi Indonesia yang menjadi produsen besar berbagai jenis komoditi. Wishnu menyatakan setuju dengan pendapat bahwa saat ini soal pembentukan harga komoditi masih jauh dari yang diharapkan banyak pihak. Namun demikian Wishnu menekankan bahwa Aspebtindo akan berusaha sebaik-baiknya mencapai prestasi terbaik yang diinginkan.

Bagi Wishnubroto industri perdagangan berjangka bukan merupakan hal asing karena sebelumnya ia menjabat komisaris di PT Sentra Investasi Berjangka. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan tahun 1991 ini juga pernah bekerja di perusahaan sekuritas, PT Maxis Securities selama 4 tahun. "Awalnya saya bekerja di bagian kredit Bank Servitia selama 5 tahun sampai akhirnya bank tersebut dilikuidasi, kemudian dilanjutkan ke BPPN [Badan Penyehatan Perbankan Nasional] selama 2 tahun. Bagi saya industri perdagangan berjangka tidak terlalu asing, karena kan tidak jauh berbeda dengan bidang sekuritas yang saya geluti sebelumnya dalam bidang sekuritas," ujar Wishnu.

Sampai saat ini Wishnubroto juga menjadi direktur di PT Sentra Arta Maxima, salah satu penyelenggara SPA [sistem perdagangan alternatif]. Wishnu mengaku sebagai Ketua Umum Aspebtindo ia menyatakan bidang pekerjaannya relatif sama dengan jenis pekerjaan yang dijalani sebelumnya. Di Aspebtindo sendiri kepengurusannya bergulir setiap 3 tahun sekali. Artinya, tinggal setahun lagi masa kerja kepengurusan di bawah Wishnubroto. Dibandingkan dengan pengalaman kerjanya di bidang perbankan, menggeluti industri PBK bagi Wishnu lebih menantang. Ia memberi gambaran jika di industri perbankan peraturan-peraturannya sudah mapan, di industri PBK peraturannya masih terus berkembang.

"Bagi saya ini suatu tantangan. Kita harus lakukan berbagai inovasi dalam perdagangan berjangka, karena kita tertinggal dari negara-negara lain yang sebenarnya tidak menghasilkan komoditi. Industri perdagangan berjangka komoditi [PBK] sangat dibutuhkan negara kita. Kami berharap ada dukungan yang kuat dari pemerintah seperti hanya pemerintah mendukung Pasar Modal," kata Wishnu.

Padahal Indonesia memiliki potensi yang luar biasa sebagai produsen berbagai jenis komoditi. Di sisi lain, menurut Wishnu, juga masih ada sisa-sisa citra atau *image* yang kurang bagus tentang PBK di pada masa lalu karena industri ini dianggap seperti judi. "Ini memang tidak mudah untuk mengubah *image* PBK. Selama ini pembentukan *image* ini belum maksimal. Kita ingin memperkenalkan lebih banyak industri PBK ke masyarakat, misalnya, melalui pameran-pameran nasional dan mengunjungi daerah-daerah untuk memperkenalkan industri ini," kata Wishnu yang lebih sering terlihat mengenakan kemeja batik ini.



Bagi saya ini suatu tantangan, kita harus lakukan berbagai inovasi dalam perdagangan berjangka, karena kita tertinggal dari negara-negara lain yang sebenarnya tidak menghasilkan komoditi



GUDANG SRG BAWANG



Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901. Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
*SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

0878-808xxxxx
Pertanyaan:
Saya bisa mengerti kalau pemerintah (Kominfo) memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan radikalisme. Tapi kenapa kok situs yang menawarkan investasi dari luar negeri juga diblokir?

Jawab:
Situs-situs yang menawarkan investasi dari luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan forex, memang diusulkan oleh Bappebti kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk diblokir. Sebab beroperasinya perusahaan tersebut tidak melalui izin Bappebti, padahal seharusnya perusahaan fores dan perusahaan perdagangan berjangka komoditi harus mendapat izin Bappebti untuk bisa beroperasi di Indonesia. Langkah penutupan website investasi seperti anda sampaikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada nasabah dan masyarakat Indonesia dari kemungkinan terjadinya penipuan alias investasi bodong

Terima kasih atas pertanyaannya, semoga dapat menambah wawasan Anda.

Tujuan Pasar Lelang Komoditas

- Tujuan diselenggarakannya Pasar Lelang Komoditas antara lain :
1. Menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga
 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan
 3. Menciptakan insentif bagi peningkatan mutu serta meningkatkan pendapatan petani produsen

Pasar Lelang Komoditas yang dikembangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan sejumlah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan, merupakan instrumen yang sangat strategis dalam upaya memperdayakan petani tersebut.

Perkembangan Sistem Pasar Lelang Terpadu



Keren SRG Sejahterakan Petani



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
www.bappebti.go.id